

MENYOAL RESOLUSI KONFLIK BERDASARKAN PERSPEKTIF TEORI KRITIS

Meilanny Budiarti Santoso

Pusat Studi CSR, Kewirausahaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Universitas Padjadjaran

E-mail: meilanny.budiarti@unpad.ac.id

ABSTRAK

Penyelesaian konflik adalah bidang pluralistik dengan beragam orientasi teoritis, karena dipengaruhi oleh konteks praktik dan tujuan spesifiknya. Penelitian ini bertujuan memahami konsepsi resolusi konflik dengan menggunakan perspektif teori kritis sebagai upaya penyelesaian konflik, sehingga netralitas yang dijanjikan dalam setiap praktik resolusi konflik dapat diklarifikasi dalam praktik. Metode deskriptif dan pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori kritis berperan penting dalam menginformasikan operasi pemeliharaan perdamaian dengan menunjukkan bahwa menciptakan perdamaian yang berkelanjutan melibatkan praktisi yang tidak hanya menunjukkan netralitas dari praktisi resolusi konflik ataupun menenangkan pihak-pihak yang bertikai. Resolusi konflik apa pun yang diusahakan oleh praktisi resolusi konflik harus menjamin hak asasi manusia, keadilan sosial dan hak ekonomi pihak-pihak yang berkonflik.

Kata kunci: konflik, resolusi konflik, teori kritis, pekerjaan sosial.

ABSTRACT

Conflict resolution is a pluralistic field with diverse theoretical orientations, as it is influenced by the context of practice and its specific goals. This research aims to understand the concept of conflict resolution using a critical theory perspective as an effort to resolve conflict so that the neutrality promised in every conflict resolution practice can be clarified in practice. A descriptive method and qualitative approach were used in this research, with data collection techniques using literature studies and documentation studies. The research results show that critical theory plays an important role in informing peacekeeping operations by showing that creating sustainable peace involves practitioners not only demonstrating the neutrality of conflict resolution practitioners or pacifying conflicting parties. Any conflict resolution attempted by conflict resolution practitioners must guarantee the human rights, social justice, and economic rights of the parties to the conflict.

Keywords: *conflict, conflict resolution, critical theory, social work.*

PENDAHULUAN

Konflik dapat terjadi dimana-mana baik di antara individu, kelompok, bangsa dan negara. Individu yang berada dalam jarak dekat dapat mengalami konflik, yaitu terkait akses terhadap sumber daya material, peluang perkawinan, dan konflik karena konteks wilayah (Parker 2006; Smith 1985; Ross 1983). Di antara sesama penghuni suatu wilayah dan di antara kerabat dapat mengembangkan konflik tambahan dalam struktur sosial tertentu, termasuk perebutan posisi dalam hierarki status atau pun dalam hal pertukaran ekonomi (Parker, Royle, dan Hartley 2002; Hames 2015).

Manusia pun mengembangkan konflik koalisi dan konflik antarkelompok lintas tingkat organisasi sosial (misalnya, tingkat kerabat, tempat tinggal, atau politik) (Roscoe 2009; Glowacki, Wilson, dan Wrangham 2017; Redhead dan Von Rueden 2021). Berbagai bentuk konflik yang dikembangkan tersebut, diduga akan mendatangkan manfaat yaitu berkurangnya risiko pemangsaan, koordinasi untuk mencapai hasil yang tinggi, tujuan yang menguntungkan namun sulit untuk dicapai, dan peningkatan kemampuan untuk mengendalikan wilayah (Willems dan van Schaik 2017; Smith et al., 2012). Selain itu, kelompok juga akan memperoleh manfaat dari mekanisme resolusi konflik

melalui proses seleksi kelompok budaya dan kerjasama yang saling menguntungkan (Richerson et al., 2016).

Resolusi konflik yang efektif sangat penting untuk kesejahteraan individu dan fungsi kelompok. Dalam hal ini, manusia memiliki kemampuan luar biasa dalam mempertahankan kerjasama dalam skala besar, termasuk di antara kekerabatan, sesama penghuni wilayah tertentu, di antara orang-orang yang tidak saling kenal, dan dalam kelompok (Santos dan West 2018).

Perdebatan dalam literatur telah menyoroti keterbatasan praktik resolusi konflik yang lazim (misalnya: berupa dialog, negosiasi, dan pendekatan penyelesaian masalah oleh pihak ketiga) ketika mencoba untuk secara efektif terlibat dalam perbedaan kekuasaan yang mengakar (Davis, 2016; Fisher, 2016; Habibal, 2019). Kekhawatiran ini bukanlah hal baru; banyak pembuat perdamaian dan aktivis menunjukkan bagaimana proses dialog dan negosiasi seringkali gagal mengatasi dinamika konflik yang mengakar pada tatanan struktural yang tidak seimbang dan tidak mampu menghasilkan perubahan yang adil (King Jr., 1963; Sharp, 2012).

Secara konseptual dan praktik, elemen struktural konflik ini sulit untuk diubah dan seringkali memerlukan bentuk partisipasi nyata dari masyarakat dan perlawanan sipil yang aktif secara langsung serta berkelanjutan, yang meningkatkan dan mendramatisasi konflik sosial dan sering kali menjadi ciri khas kelompok aktivis dan gerakan sosial (Chenoweth & Cunningham, 2013; Disney & Gbowee, 2012). Berdasarkan hal tersebut, banyak juga pihak-pihak yang menyerukan kepada para praktisi dan akademisi resolusi konflik untuk lebih terlibat dalam gerakan sosial dan bekerja secara langsung dengan para aktivis (Ross, Burnett, Raschupkina, & Kew, 2019; Roy, Burdick, & Kriesberg, 2010; Smith & Verdeja, 2013).

Pendekatan resolusi konflik dengan netralitas dalam proses resolusi konflik yang dilakukan oleh pihak ketiga telah banyak dikritik karena hal tersebut dinilai lebih mempertahankan *status quo* bagi para elit dibandingkan menantang asimetri kekuasaan dan kesenjangan struktural yang membentuk dinamika konflik (Hansen, 2008; Jackson, 2015; Mayer, 2004; Schoeny & Warfield, 2000; Wing, 2008).

Terkait hal tersebut, Cobb dan Rifkin (1991) mendekonstruksi retorika netralitas dan menekankan bahwa dalam praktiknya para profesional resolusi konflik tenggelam dalam dinamika kekuasaan. Hal tersebut terjadi karena dalam bidang ini sering kali mengandalkan orientasi “pemecahan masalah”, adapun pertanyaan tentang perubahan sistem yang lebih luas dapat diabaikan (Jackson, 2015).

Dalam situasi demikian, Schoeny dan Warfield (2000: 258) mengungkapkan implikasinya jika dibiarkan, yaitu bahwa pendekatan resolusi konflik secara sadar atau bahkan tidak sengaja akan terfokus pada “pemeliharaan sistem” dan jika sistem tersebut tidak adil, maka akan menjadi “pelayan penindasan”. Mayer (2004) mendesak bidang resolusi konflik untuk “melampaui netrality” dan terlibat lebih jauh dalam menangani konflik dan advokasi.

Sudah sejak lama Rapoport (1970) berpendapat bahwa resolusi konflik berpotensi dilihat sebagai alat “pihak mapan” untuk menenangkan pihak-pihak yang berkonflik, sehingga berpotensi melemahkan upaya kelompok marginal dalam mencapai keadilan sosial. Dalam hal ini, Stohl dan Chamberlain (1972) menyandingkan tujuan keadilan sosial dengan tujuan stabilitas sosial, mempertanyakan apakah mungkin bagi para praktisi resolusi konflik untuk mencapai kedua tujuan tersebut secara bersamaan. Eide (1972) lebih jauh mengatakan bahwa upaya mencapai

netralitas dalam profesi mungkin sebenarnya lebih mengarah pada menutupi ketidakadilan kekuasaan yang mengatur hubungan pihak-pihak yang berkonflik. Netralitas sejati tidak mungkin terjadi dalam resolusi konflik karena masyarakat elit mendapatkan keuntungan dari posisi tersebut, memegang kekuasaan dan memperoleh hak istimewa di luar proses resolusi konflik itu sendiri. Oleh karena itu, proses resolusi konflik akan lebih condong ke arah elit masyarakat dibandingkan kelompok “*underdog*” (yang tidak diunggulkan), sehingga memperkuat *status quo*.

Sebagai bantahan terhadap premis bahwa resolusi konflik digunakan sebagai alat oleh pihak yang berkuasa, Kent (1971) menyatakan hal yang sebaliknya bahwa resolusi konflik bukanlah alat dari pihak yang berkuasa dan para ahli konflik mempunyai otonomi yang cukup untuk melakukan hal tersebut dengan mengkaji konflik secara kritis dan proses resolusi konflik. Faktanya, independensi praktisi resolusi konfliklah yang memungkinkan mereka membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menemukan penyebab konflik dan membantu menyusun resolusi konflik yang adil.

Tidak ada pendekatan yang bisa diterapkan secara universal dalam mengembangkan proses resolusi konflik karena proses tersebut harus disesuaikan untuk memenuhi tuntutan dan keadaan unik dari pihak-pihak yang terlibat (Brown, 2017; Lederach, 2005). Namun demikian, pekerjaan sosial telah menggunakan teori kritis untuk menghadapi masalah keadilan sosial yang dihadapi oleh klien yang mereka layani sehari-hari (Payne, 2005). Faktanya, pekerja sosial kritis seperti halnya David Gil (1998) telah mengembangkan prinsip-prinsip praktik yang memandu calon pekerja sosial kritis dalam praktik komunitas. Bidang resolusi konflik dan praktisi yang tertarik untuk mengatasi masalah keadilan sosial dapat

memperoleh manfaat besar dengan belajar dari teori kritis dan dari kebijaksanaan praktik ini.

Quille (2000) menjelaskan teori kritis mungkin mempunyai peran penting dalam menginformasikan operasi pemeliharaan perdamaian dengan menunjukkan bahwa menciptakan perdamaian yang berkelanjutan melibatkan lebih dari sekedar menenangkan pihak-pihak yang bertikai; resolusi konflik dalam hal apa pun juga harus menjamin hak asasi manusia dan hak ekonomi pihak-pihak yang berkonflik. Jenis pembangunan perdamaian ini berbeda dengan operasi pemeliharaan perdamaian tradisional dengan memberdayakan dan mengembangkan komunitas lokal.

Secara lebih lugas, Martin (2005) menyatakan bahwa dukungan terhadap kelompok yang tidak diunggulkan memastikan bahwa pembangunan perdamaian melindungi kelompok minoritas dan hak asasi manusia, dibandingkan dengan mendukung tatanan sosial yang konservatif dan dilegitimasi oleh elit.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik studi literatur dan studi dokumentasi yaitu terhadap berbagai referensi yang relevan dengan kajian resolusi konflik berdasarkan perspektif teori kritis.

Literatur yang dikumpulkan berupa artikel pada publikasi jurnal nasional dan jurnal internasional, selain itu digunakan juga literatur buku ataupun ebook. Literatur yang dikumpulkan dalam penelitian ini tidak dibatasi rentang waktu publikasinya. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya literatur terkait penelitian ini, sehingga kehadiran berbagai literatur yang diperoleh dan dianalisis oleh peneliti

menjadi sangat berarti untuk melengkapi hasil yang diperoleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesadaran Kritis dalam Resolusi Konflik

Penyelesaian konflik merupakan disiplin pluralistik yang memerlukan sejumlah konsepsi dan metode untuk mengatasi berbagai jenis konflik yang terjadi sesuai dengan konteks dari masing-masing kejadian konflik. Penyelesaian konflik dengan pendekatan teori kritis menempatkan para praktisi pada peran baru untuk mengatasi dan memperbaiki penindasan terhadap masyarakat. Penindasan dan ketidakadilan sosial dianggap sebagai konflik yang bertingkat dan bersarang, yang terjadi secara bersamaan pada tingkat individu, komunitas, dan masyarakat. Resolusi konflik berdasarkan teori kritis menjadi sarana untuk menantang ketidakadilan dan penindasan sosial.

Dalam bidang kesejahteraan sosial, misalnya dalam hal layanan organisasi nirlaba dan kebijakan sosial dari pemerintah untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan, dapat dianggap sebagai sarana untuk memediasi konflik kelas, gender, dan etnis, baik untuk menutupi ataupun mengelola konflik-konflik tersebut, sehingga sangat tergantung pada implementasinya di lapangan (Chatterjee, 1996).

Praktisi resolusi konflik yang bekerja dengan lembaga kesejahteraan sosial dapat menggunakan lensa kritis untuk mengelola konflik individu, kelompok, dan organisasi dalam sistem tersebut, sebagai fasilitator dalam dialog yang mendorong komunikasi produktif di antara individu atau kelompok dengan tingkat kekuasaan berbeda.

Ketidakseimbangan sosial yang ditunjukkan dengan terjadinya penindasan terhadap masyarakat, memperkuat eksploitasi anggota masyarakat tertentu demi keuntungan dan hak istimewa pihak yang lainnya, sehingga mengakibatkan ketidaksetaraan hak, ketimpangan kondisi

hidup, dan distribusi sumber daya yang tidak adil (Gil, 1998).

Ketidakadilan merujuk untuk secara paksa membangun dan memelihara ketidaksetaraan, diskriminasi, dan kondisi hidup yang tidak manusiawi, serta menghambat pembangunan (misalnya berupa perbudakan, kerja upahan yang eksploitatif; pengangguran, kemiskinan, kelaparan, dan tunawisma; serta layanan kesehatan dan pendidikan yang tidak memadai), yang diterapkan oleh kelompok sosial, kelas, dan masyarakat yang dominan atas kelompok, kelas, dan masyarakat yang didominasi dan dieksploitasi (Gil, 1998: 10).

Penindasan merujuk pada modus hubungan manusia yang melibatkan dominasi dan eksploitasi—ekonomi, sosial, dan psikologis—di antara individu; di antara kelompok dan kelas sosial di dalam dan di luar masyarakat; dan secara global di antara seluruh masyarakat.

Oleh karena itu penindasan masyarakat berdampak buruk terhadap seluruh masyarakat, baik penindas terlebih pada pihak yang tertindas, dengan tidak memanusiakan mereka dan memberikan keuntungan pada kelompok tertentu dengan mengorbankan kelompok lain. Kaum tertindas mengalami dehumanisasi ketika mereka tidak diberi kesempatan yang dianggap remeh oleh para penindas dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan memenuhi kebutuhan mereka (Freire, 1997). Para penindas mengalami dehumanisasi dengan mengendalikan dan melanggar hak-hak kaum tertindas dan menjadi dominator, mempolarisasi komunitas mereka, dan menyangkal rasa kasih sayang yang ada pada diri mereka sebagai manusia terhadap sesama manusia (Freire, 1997).

Ketidakseimbangan sosial yang terjadi secara sistemik tersebut memerlukan perubahan secara sistemik pula, yaitu perubahan terhadap struktur sosial dan tatanan sosial yang dianggap remeh untuk mengatasinya, sehingga menciptakan kesetaraan yang lebih besar antarkelompok

(Galper, 1975). Inilah hakikat keadilan sosial, sebagai tujuan utama dari pekerjaan sosial kritis, seperti halnya *National Association of Social Workers* (1999) yang mendefinisikan keadilan sosial sebagai “mengupayakan perubahan sosial, khususnya dengan dan atas nama individu dan kelompok yang rentan dan tertindas.”

Foucault (1994b) melihat potensi transformatif wacana masyarakat sebagai sarana untuk mengubah masyarakat, dibandingkan revolusi seperti yang dianjurkan oleh pemikiran Marxis (Chambon, Irving, dan Epstein, 1999). Transformasi tersebut dapat dicapai dengan “menggangu” pemahaman masyarakat umum mengenai fenomena dan hubungan sosial, menggoyahkan wacana masyarakat melalui analisis dan penggunaan bahasa, bukan dengan kekerasan seperti yang dibayangkan oleh Marx dan Engels (Chambon, Irving, dan Epstein, 1999; Foucault, 1994b).

Ide-ide konstruktivis tersebut memungkinkan para analis untuk melihat lebih banyak kompleksitas yang terjadi ketika mengkonseptualisasikan kekuasaan (*power*), menjadikan transformasi masyarakat bersifat bertahap (dan tidak terlalu ditolak) sambil tetap mempertahankan analisis dominasi ideologis masyarakat dan kesadaran palsu (*false consciousness*).

Wacana masyarakat sering kali dikendalikan oleh elit yang dapat menghambat analisis kekuasaan resmi di tingkat masyarakat, demi melindungi tatanan sosial yang ada (Freire, 1997). Pemikiran Freire (1997) tersebut muncul dalam karyanya menangani masyarakat miskin di Brasil yang menghadapi kenyataan penindasan sehari-hari. Freire (1997) menetapkan bahwa perubahan masyarakat akan muncul dari suatu jenis pendidikan, yang didasarkan pada dialog dan penemuan diri, sehingga membantu kelompok tertindas dalam memahami hambatan struktural terhadap harapan mereka terhadap keadilan dan kesetaraan sosial.

Freire menyebut kesadaran berdasarkan pemahaman baru tersebut sebagai “*critical consciousness*” atau kesadaran kritis (Freire, 1997). Mendidik kesadaran kritis memberi para ahli teori kritis sarana untuk mendukung kelompok-kelompok marginal dalam mencapai berbagai tujuan mereka. Ide-ide konstruktivis ini mempunyai dampak besar terhadap pemikiran radikal, dan “teori kritis” muncul dari kesatuan ini.

Berdasarkan hal tersebut, Freire menyarankan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dapat dicapai melalui jenis pendidikan baru, yang disebut “*problem-posing education*” yaitu di mana siswa belajar mendekonstruksi ideologi masyarakat yang mempengaruhi mereka dalam kehidupan sehari-hari, melihat bagaimana ideologi tersebut menghambat pencapaian kepentingan mereka, dan memvisualisasikan kemungkinan perubahan masyarakat yang dapat melayani kepentingan mereka dengan lebih baik. Pendidikan yang mengajukan masalah pada akhirnya menghasilkan “kesadaran kritis” (*critical consciousness*) yang dapat menjadi emansipatoris bagi individu-individu tertindas yang kemudian dapat berupaya mengubah dunia mereka dan ideologi masyarakat yang menindas sesuai dengan pemahaman baru Mereka.

Ketika individu mencapai kesadaran kritis, hal ini memungkinkan mereka untuk menjadi subjek dalam dunianya, secara aktif dan sadar ikut menciptakan dunianya sendiri, dibandingkan menjadi “objek” pasif yang menerima realitas sosialnya (Chambon, Irving, dan Epstein, 1999; Foucault, 1994a; Freire, 1997). Dengan cara ini, teori kritis memerlukan *praxis*, mengatasi masalah dan kendala dunia nyata, dibandingkan hanya berteori.

Praxis adalah hubungan timbal balik, dinamis, dan refleksif yang dilakukan para praktisi ketika teori mereka tentang penindasan masyarakat menjadi dasar tindakan mereka untuk melawan penindasan tersebut, dan sebaliknya (Marx dan Engels, 1985). *Praxis* juga

menempatkan akademisi atau praktisi pada posisi refleksi secara terus menerus, mempertanyakan hubungan teori-tindakan untuk terus merevisi pendekatannya.

Orientasi *praxis* pada dasarnya berorientasi pada masa depan dan penuh harapan, dengan para sarjana-praktisi menciptakan visi baru untuk hubungan masyarakat dalam mengatasi dominasi masyarakat, yang pada gilirannya merupakan dorongan untuk kemajuan analisis dan tindakan masyarakat lebih lanjut (Freire, 1997; Scanlon dan Longres, 2001).

Teori kritis relevan untuk bidang resolusi konflik karena teori kritis menawarkan kerangka kerja bagi para praktisi dan para pakar resolusi konflik yang dapat memandu mereka dalam membantu pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengatasi penindasan dan ketidakadilan dalam masyarakat ataupun antarpribadi. Hal tersebut sejalan dengan tujuan akhir yang hendak dicapai oleh teori kritis, yaitu menciptakan transformasi hubungan masyarakat dan institusi yang bersifat eksploitatif, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih adil.

Praktik Pekerjaan Sosial Kritis dalam Resolusi Konflik

Resolusi konflik kritis menempatkan para praktisi resolusi konflik dalam peran dan situasi yang berbeda dari para praktisi resolusi konflik tradisional. Dibandingkan pihak ketiga yang netral, praktisi resolusi konflik mungkin lebih cocok mengambil peran sebagai katalis, pendidik, advokat, penasihat, navigator sistem, atau peran lain yang dapat membantu orang-orang yang tertindas dalam menantang penindasan dengan mendorong dialog yang produktif (Kent, 1971; Knupfer, 1995; Stohl dan Chamberlain, 1972).

Sudah banyak praktisi dan akademisi resolusi konflik yang telah melakukan hal tersebut mengadopsi peran yang tidak lazim seperti itu, seperti halnya pendidikan resolusi konflik misalnya, di mana para

praktisi mendidik dan melakukan advokasi, bukan melakukan mediasi. Peran yang muncul dan beragam dalam profesi resolusi konflik ini mungkin juga memerlukan pengaturan baru dan inovatif untuk memupuk bentuk-bentuk baru praktik resolusi konflik, seperti pada organisasi nirlaba sebagai pusat aktivitas yang mengupayakan perdamaian dan pencapaian keadilan yang mendidik anggota masyarakat untuk memiliki kesadaran kritis, melatih mereka dalam keterampilan komunikasi, dan menumbuhkan wacana keadilan sosial.

Para praktisi di bidang resolusi konflik mempunyai posisi profesional yang baik untuk melakukan pekerjaan kritis karena merekalah satu-satunya profesional yang mengkaji konflik sosial secara holistik dan terampil dalam berbagai proses inti untuk melakukan intervensi dalam konflik, yaitu berupa: negosiasi, mediasi, arbitrase, netralitas awal, evaluasi, konferensi komunitas, pembuatan peraturan yang dinegosiasikan, pelatihan komunikasi dan pemecahan masalah, serta upaya untuk mengurangi kekerasan (*Association for Conflict Resolution*, n.d.). Bidang keterampilan ini membuat para praktisi penyelesaian konflik yang dilakukan secara unik cocok untuk melakukan bentuk-bentuk praktik kritis tertentu, yaitu melakukan intervensi dalam konflik yang berkaitan dengan keadilan sosial.

Sebelumnya untuk melakukan resolusi konflik yang kritis, para praktisi harus melakukan analisis kekuatan dari pihak-pihak yang berkonflik. Dalam analisis kekuasaan, seorang praktisi “memeriksa bagaimana kekuasaan didistribusikan dalam situasi tertentu berdasarkan, misalnya: ras, gender, pendidikan, ekonomi, orientasi seksual, atau sejarah sosio-politik.

Melalui analisis kekuatan, [praktisi] dan klien mencapai pemahaman yang lebih terinformasi dan peka terhadap konteks tentang keyakinan, pilihan, persepsi, dan perilaku. Komponen penting dari analisis

kekuasaan adalah memahami makna dan dampak dari hak istimewa” (McWhirter dan McWhirter, 2007: 423).

Untuk menganalisis hal tersebut, praktisi harus melakukan analisis secara mandiri, yaitu untuk memahami peran kekuasaan dalam interaksi dengan pihak-pihak yang berkonflik, serta analisis terhadap pihak-pihak itu sendiri (McWhirter dan McWhirter, 2007). Dalam melakukan analisis kekuasaan, seorang praktisi resolusi konflik harus mempertimbangkan ketidakseimbangan kekuasaan dalam masyarakat dan hal-hal yang berasal dari budaya, institusi, organisasi, bahasa, dan sistem kepercayaan praktisi dan partai (Roy, 2007).

Bentuk-bentuk kekuasaan yang relevan dipetakan dan bergantung pada konteks yang dapat mencakup bentuk-bentuk kekuasaan dan hak istimewa lainnya, seperti bentuk-bentuk kekuasaan dan hak istimewa yang berkaitan dengan usia atau kemampuan fisik (McWhirter dan McWhirter, 2007). Praktisi resolusi konflik menggunakan analisis kekuasaan selama bekerja dengan para pihak untuk mendidik mereka tentang bagaimana kekuatan masyarakat dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku mereka, sehingga memungkinkan mereka untuk mengusahakan dan mengatasi hambatan yang terkait dengan keadilan sosial dalam dialog dan resolusi konflik.

Dalam hal ini, seperti halnya Freire, Lederach (2005) pun menyadari bahwa menekankan suara masyarakat yang bekerja sama akan membantu praktisi mendapatkan kredibilitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang berkonflik, sekaligus mengakui bahwa penyelesaian yang mungkin dilakukan harus didasarkan pada pengetahuan dan bahasa lokal. Pendekatan elektif menggambarkan bagaimana pengambilan keputusan dari awal dapat secara bersamaan membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk memenuhi kebutuhan mendesak mereka dengan lebih baik dan mewujudkan tujuan struktural jangka panjang mereka.

Ketika masyarakat tertindas mencapai kesadaran kritis, mereka mengidentifikasi kebutuhan, hambatan, dan solusi potensial terhadap permasalahan mereka berdasarkan pemahaman baru mereka tentang kekuatan masyarakat. Ketika menyerukan suara kaum tertindas untuk mengidentifikasi keprihatinan mereka dan potensi penyelesaiannya, maka hal tersebut menunjukkan demokrasi partisipatif akar rumput sedang diimplementasikan (O'Brien, 2005).

Meskipun praktik kritis menekankan perubahan sosial struktural jangka panjang dalam membantu kelompok tertindas, strategi jangka pendek juga diperlukan, yaitu untuk memperbaiki “gejala” penindasan dan mengurangi atau menghilangkan praktik penindasan yang menasar pada individu atau kelompok tertentu yang tertindas dalam situasi tertentu. Sebaliknya, strategi jangka panjang berupaya menghilangkan akar penyebab penindasan, dengan harapan dapat menciptakan masyarakat adil yang bebas dari penindasan.

Strategi jangka pendek dan jangka panjang akan ditingkatkan dengan adanya praktisi resolusi konflik yang mempromosikan dan meningkatkan komunikasi di antara para pihak yang tertindas dan pihak penindasnya, serta memfasilitasi diskusi di antara individu yang tertindas untuk membantu mereka menentukan kebutuhan dan cara yang mereka pilih untuk mencapai tujuan mereka.

Terlepas dari apakah strategi itu bersifat jangka pendek atau jangka panjang, berbagai hal tersebut menyiratkan kode etik yang sangat berbeda dengan apa yang saat ini ditekankan pada banyak kalangan penyelesaian konflik. *American Arbitration Association, American Bar Association, dan Association for Conflict Resolusi* (2005) menyoroti penentuan nasib sendiri, ketidakberpihakan, menghindari konflik kepentingan, kompetensi, kerahasiaan, kualitas proses mediasi, permintaan layanan yang

bertanggung jawab, biaya yang wajar, dan memajukan praktik mediasi sebagaimana standar etika mereka dalam Model Standards of Conduct for Mediators (2005).

Namun, praktik kritis menyarankan serangkaian prinsip etika yang sangat berbeda. Prinsip-prinsip etika kritis cenderung kurang fokus pada peran profesional praktisi resolusi konflik, melainkan lebih fokus pada komitmen praktisi resolusi konflik terhadap keadilan sosial, termasuk kepedulian terhadap kesejahteraan umum umat manusia, memenuhi kebutuhan semua orang dalam masyarakat, nilai-nilai kritis yang konsisten dalam diri dan pribadi seseorang.

Kehidupan profesional, memajukan teori dan praktik kritis, mendukung sesama praktisi kritis dan menegakkan standar etika kritis, menghargai kebebasan semua orang, berupaya menjunjung cita-cita demokratis dan humanistik, serta berupaya mengubah masyarakat agar sesuai dengan prinsip-prinsip etika ini (Galper, 1975).

Dalam hal ini, Gil (1998: 104-108) menguraikan prinsip-prinsip praktik pekerjaan sosial kritis, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menolak gagasan netralitas politik dan percaya pada keadilan dan pembebasan sosial
- 2) Memilih nilai secara sadar: kesetaraan, kebebasan, kerja sama, dan komunitas
- 3) Melampaui pendekatan teknis dan profesional
- 4) Memfasilitasi kesadaran kritis melalui dialog
- 5) Advokasi hak asasi manusia
- 6) Menghadapi hambatan dalam pemenuhan kebutuhan
- 7) Menganalisis penindasan dalam kehidupan pribadi seseorang
- 8) Menganalisis kemungkinan-kemungkinan di masa depan
- 9) Menyebarkan kesadaran kritis dan membangun gerakan sosial

Praktisi resolusi konflik yang kritis harus mematuhi pedoman praktik tertentu

dalam konteks melaksanakan pekerjaan mereka: mengembangkan diri untuk mencerminkan cita-cita kritis; menghubungkan pekerjaan seseorang dengan gerakan sosial yang lebih luas; solusi politik terhadap masalah-masalah sosial; berfokus pada pencegahan konflik dengan resolusi jangka panjang; pencegahan yang berlangsung dalam waktu lama; dan menciptakan keadilan. Untuk membantu orang lain dalam mengatasi penindasan, para praktisi perlu terlebih dahulu mempertanyakan nilai-nilai dan pengalaman diri mereka sendiri dalam menghadapi penindasan.

Teori kritis juga menekankan hubungan egaliter antara praktisi resolusi konflik dengan klien seperti halnya seorang kolega (Galper, 1975, 1980). Hal ini berarti praktisi resolusi konflik melepaskan perannya sebagai seorang “ahli” demi menjalankan pembelajaran timbal balik dan praktik yang didorong oleh diri klien. Ketika individu yang tertindas telah mencapai kesadaran kritis dengan dididik mengenai ketidakseimbangan kekuatan struktural, maka mereka menjadi berdaya untuk mengidentifikasi manifestasi penindasan dan menentukan cara untuk mengatasinya.

Dalam hal ini, praktisi resolusi konflik kritis ditugaskan untuk memfasilitasi diskusi kritis mengenai wacana masyarakat yang menggambarkan perspektif pribadi mengenai penindasan, hambatan dalam mengubah hubungan yang menindas, dan potensi cara untuk mengatasi hambatan tersebut dari pihak yang tertindas itu sendiri (Freire, 1997; Galper, 1980; Galtung, 2000).

Oleh karena itu, dialog kritis yang mencakup refleksi kelompok tertindas terhadap norma-norma, institusi, bahasa, dan nilai-nilai masyarakat, serta diskusi mengenai tindakan yang harus diambil untuk mengubah fenomena yang terjadi digunakan untuk memajukan keadilan sosial (Chambon, Irving, dan Epstein, 1999; Freire, 1997; Galtung, 2000).

Dalam bidang resolusi konflik

terdapat perdebatan aktif mengenai perlunya dan batasan upaya untuk mengintegrasikan praktik-praktik yang ditunjukkan oleh kerangka kerja kritis, termasuk hubungan antara praktisi resolusi konflik dengan bentuk-bentuk eskalasi konflik yang konstruktif, seperti: (a) Aksi langsung tanpa kekerasan, (b) Mobilisasi massa, dan (c) Pendidikan populer (English & Sweetman, 2017; Jackson, 2015; Rubenstein, 2017).

Konsep kekuasaan yang digunakan oleh para ahli teori kritis telah dikritik karena terlalu sempit, hanya berfokus pada keadilan kolektif dibandingkan dengan keadilan individu dan secara eksklusif mempertimbangkan dominasi oleh elit ketika kelompok “tidak berdaya” atau “powerless” dapat menggunakan kekerasan dan kekuasaan sosial untuk memajukan kepentingan dan tujuan mereka sendiri (Payne, 2005; Spencer, 1991).

Dalam resolusi konflik, hal ini dapat menimbulkan masalah ketika pengalaman subjektif klien dan pemahaman mereka diminimalkan (*ideological concerns*) dan lebih mendukung pemahaman praktisi paternalis yang didasarkan pada masyarakat secara keseluruhan (*materialist concerns*; Eide, 1972; Heyworth, 1991; Spencer, 1991).

Kondisi yang paling buruk adalah ketika teori kritis digunakan untuk menyalahkan lingkungan sosial seseorang dan menyalahkan tempatnya di dalamnya semua masalah dan konflik, sehingga menghilangkan personal *agency* dan tanggung jawab untuk memperbaiki kekhawatiran tersebut (Payne, 2005). Demikian pula, “kaum mapan” atau “*the establishment*” yang dianggap oleh para ahli teori kritis dalam istilah yang sangat stereotip dan satu dimensi (Kent, 1971; Spencer, 1991), yang dapat menciptakan polarisasi lebih lanjut antar pihak yang berkonflik.

KESIMPULAN

Praktik dan teori resolusi konflik yang muncul dari kerangka kritis mengarahkan profesi resolusi konflik ke arah yang baru dan penting: melawan status quo yang tidak adil. Penyelesaian konflik dapat diperkaya dengan lebih banyak perhatian yang diberikan pada analisis kekuasaan, penyeimbangan kekuasaan, dan pencapaian resolusi berkelanjutan yang melawan ketidakadilan dan penindasan sosial.

Penyelesaian konflik yang kritis tentu saja mempunyai keterbatasan, namun hal ini dapat melengkapi bentuk-bentuk penyelesaian konflik lainnya, dengan mengatasi konflik yang memiliki landasan keadilan sosial dengan menggunakan teknik yang sesuai dengan permasalahan tersebut. Dengan demikian, teori dan praktik kritis mengisi ruang khusus dalam bidang resolusi konflik. Kerangka teoritis yang kritis harus hidup berdampingan dengan orientasi teoritis lainnya dalam profesi resolusi konflik yang pluralistik

DAFTAR PUSTAKA

- American Arbitration Association, American Bar Association, and Association for Conflict Resolution. (2005). *Model Standards of Conduct for Mediators*, Critical Conflict Resolution Theory and Practice 423. DOI: 10.1002/crq retrieved
- Brown, A. A. (2017). *Emergent strategy: Shaping change, changing worlds*. Chico, CA: AK Press.
- Chambon, A. S., Irving, A., and Epstein, L. (1999). “Foucault’s Approach: Making the Familiar Visible.” In A. S. Chambon, A. Irving, and L. Epstein (eds.), *Reading Foucault for Social Work*. New York: Columbia University Press.
- Chatterjee, P. (1996). *Approaches to the Welfare State*. Washington, D.C.: National Association of Social Workers.
- Chenoweth, E., & Cunningham, K. G. (2013). *Understanding nonviolent*

- resistance: An introduction. *Journal of Peace Research*, 50(3), 271–276. <https://doi.org/10.1177/0022343313480381>
- Cobb, S., & Rifkin, J. (1991). Practice and paradox: Deconstructing neutrality in mediation. *Law and Social Inquiry*, 16(1), 35–62. <https://doi.org/10.1111/j.1747-4469.1991.tb00283.x>
- Davis, A. Y. (2016). *Freedom is a constant struggle: Ferguson, Palestine, and the foundations of a movement*. Chicago, IL: Haymarket Books.
- Disney, A., & Gbowee, L. (2012). Gender and sustainable peace. In P. T. Coleman (Ed.), *Psychological components of sustainable peace* (pp. 197–203). New York, NY: Springer.
- Eide, A. (1972) “Dialogue and Confrontation in Europe.” *Journal of Conflict Resolution*. 16(4), 511–522.
- English, M. D., & Sweetman, D. (2017). Critical conflict resolution, systemic consciousness and systemic contractions. *Journal of Mediation and Applied Conflict Analysis*, 4(1), 519–530. <https://doi.org/10.33232/jmaca.4.1.8331>
- Fisher, R. J. (2016). Ronald J. Fisher: Advancing the understanding and effectiveness of third party interventions in destructive intergroup conflict. In R. J. Fisher (Ed.), *Ronald J. Fisher: A north American Pioneer in interactive conflict resolution* (Vol. 14, pp. 3–29). Cham, Switzerland: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-39038-3_1
- Foucault, M. (1994a). “The Subject and Power.” In P. Rubinow and N. Rose (eds.), *The Essential Foucault*. New York: New Press.
- Foucault, M. (1994b). “Truth and Power.” In P. Rubinow and N. Rose (eds.), *The Essential Foucault*. New York: New Press.
- Freire, P. (1997). *Pedagogy of the Oppressed* (20th anniversary ed.). New York: Continuum.
- Galper, J. (1980). *Social Work Practice: A Radical Perspective*. Upper Saddle River, N.J.: Prentice-Hall.
- Galper, J. (1975). *The Politics of Social Services*. Upper Saddle River, N.J.: Prentice-Hall.
- Galtung, J. (2000). *Conflict Transformation by Peaceful Means: The Transcend Method, Participant's and Trainer's Manual*.
- Gil, D. G. (1998). *Confronting Injustice and Oppression: Concepts and Strategies for Social Workers*. New York: Columbia University Press.
- Glowacki, Luke, Michael L. Wilson, and Richard W. Wrangham. (2017). “The evolutionary anthropology of war.” *Journal of Economic Behavior and Organization*. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2017.09.014>.
- Habibal, O. (2019). Evolution of international peace and conflict resolution studies. *International Journal of Social Science Research and Review*, 2(3), 8–17.
- Hames, Raymond. (2015). “Kin Selection.” In *The Handbook of Evolutionary Psychology*, edited by David Buss, Second edition, 2:505–23. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc
- Hansen, T. (2008). Critical conflict resolution theory and practice. *Conflict Resolution Quarterly*, 25(4), 403–427. <https://doi.org/10.1002/crq.215>
- Heyworth, E. (1991). “‘Town’/‘Gown’ and Community Relations: Case Studies of Social Empowerment.” In P. Harries-Jones (ed.), *Making Knowledge Count: Advocacy and Social Science*. Buffalo, N.Y.: McGill-Queens University Press.
- Jackson, R. (2015). How resistance can save peace studies. *Journal of Resistance Studies*, 1(1), 18–49.
- Kent, G. (1971). “The Application of Peace Studies.” *Journal of Conflict Resolution*. 15(1) 47–53.
- Knupfer, A. M. (1995). “Conflict

- Resolution or ‘Convict Revolution’? The Problematics of Critical Pedagogy in the Classroom.” *Urban Education*. 30(2), 219–239.
- King, M. L., Jr. (1963). Letter From Birmingham Jail.
- Lederach, J. P. (2005). *The moral imagination: The art and soul of building peace*. Oxford University Press.
- Martin, A. S. (2005). “Working Paper 15: The Contribution of Critical Theory to New Thinking on Peacekeeping: Some Lessons from MINURSO,”
- Mayer, B. S. (2004). *Beyond neutrality: Confronting the crisis in conflict resolution* (1st ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- McWhirter, B. T., and McWhirter, E. H. (2007). “Grounding Clinical Training and Supervision in an Empowerment Model.” In E. Aldarondo (ed.), *Advancing Social Justice Through Clinical Practice*. Mahwah, N.J.: Erlbaum.
- National Association of Social Workers. (1999). *Code of Ethics*.
- O’Brien, C. (2005). “Integrated Community Development/Conflict Resolution Strategies as ‘Peace Building Potential’ in South Africa and Northern Ireland.” *Community Development Journal*. 42(1), 114–130
- Parker, G. A. (2006). “Sexual Conflict over Mating and Fertilization: An Overview.” *Philosophical Transactions of the Royal Society of London B: Biological Sciences* 361 (1466): 235–59. <https://doi.org/10.1098/rstb.2005.1785>
- Parker, Geoff A., Nick J. Royle, and Ian R. Hartley. (2002). “Intrafamilial Conflict and Parental Investment: A Synthesis.” *Philosophical Transactions: Biological Sciences* 357 (1419): 295-307
- Payne, M. (2005). “From Radical to Critical Perspectives.” In *Modern Social Work Theory* (3rd ed.). Chicago: Lyceum,.
- Quille, M. M. (2000). “Working Papers: A Response to Recent Critiques of Conflict Resolution: Is Critical Theory the Answer?”
- Redhead, Daniel, and Christopher Von Rueden. (2021). “Coalitions and Conflict: A Longitudinal Analysis of Men’s Politics.” *Evolutionary Human Sciences*, 1–28. <https://doi.org/10.1017/ehs.2021.26>.
- Rapoport, A. (1970). “Can Peace Be Applied?” *Journal of Conflict Resolution*. 14(2), 277–286.
- Richerson, Peter, Ryan Baldini, Adrian V. Bell, Kathryn Demps, Karl Frost, Vicken Hillis, Sarah Mathew, Emily K. Newton, Nicole Naar, and Lesley Newson. (2016). “Cultural Group Selection Plays an Essential Role in Explaining Human Cooperation: A Sketch of the Evidence.” *Behavioral and Brain Sciences* 39.
- Ross, K., Burnett, C., Raschupkina, Y., & Kew, D. (2019). Scaling-up peacebuilding and social justice work: A conceptual model. *Peace and Change*, 44(4), 497–526. <https://doi.org/10.1111/pech.12371>
- Roy, B., Burdick, J., & Kriesberg, L. (2010). A conversation between conflict resolution and social movement scholars. *Conflict Resolution Quarterly*, 27(4), 347–368. <https://doi.org/10.1002/crq.20002>
- Roy, B. (2007). “Radical Psychiatry: An Approach to Personal and Political Change.” In E. Aldarondo (ed.), *Advancing Social Justice Through Clinical Practice*. Mahwah, N.J.: Erlbaum.
- Roscoe, P. (2009). “Social Signaling and the Organization of Small-Scale Society: The Case of Contact-Era New Guinea.” *Journal of Archaeological Method and Theory* 16: 69–116.
- Ross, Marc Howard. (1983). “Political Decision Making and Conflict: Additional Cross Cultural Codes and Scales.” *Ethnology* 169. <https://doi.org/10.2307/3773578>.
- Rubenstein, R. E. (2017). *Resolving*

- structural conflicts: How violent systems can be transformed.* London, England: Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781315665764>
- Santos, Miguel dos, and Stuart A. West. (2018). “The Coevolution of Cooperation and Cognition in Humans.” *Proc. R. Soc. B* 285 (1879): 20180723.
<https://doi.org/10.1098/rspb.2018.0723>
- Scanlon, E., and Longres, J. F. (2001). “Social Justice and the Research Curriculum.” *Journal of Social Work Education*. 37(3), 447–463.
- Schoeny, M., & Warfield, W. (2000). Reconnecting systems maintenance with social justice: A critical role for conflict resolution. *Negotiation Journal*, 16(3), 253–268.
<https://doi.org/10.1111/j.1571-9979.2000.tb00217.x>
- Smith, Eric Alden. (1985). “Inuit Foraging Groups: Some Simple Models Incorporating Conflicts of Interest, Relatedness, and Central-Place Sharing.” *Ethology and Sociobiology* 6: 27–47
- Smith, Jennifer E., Eli M. Swanson, Daphna Reed, and Kay E. Holekamp. (2012). “Evolution of Cooperation Among Mammalian Carnivores and Its Relevance to Hominin Evolution.” *Current Anthropology* 53 (S6): S436–S452.
- Smith, J., & Verdeja, E. (Eds.). (2013). *Globalization, social movements, and Peacebuilding*. Syracuse, NY: Syracuse University Press.
- Spencer, M. (1991). “Advocating Peace.” In P. Harries-Jones (ed.), *Making Knowledge Count: Advocacy and Social Science*. Buffalo, N.Y.: McGill-Queens University Press.
- Stohl, M., and Chamberlain, M. (1972). “Alternative Futures for Peace Research.” *Journal of Conflict Resolution*. 16(4), 523–530.
- Willems, Erik P., and Carel P. van Schaik. (2017). “The Social Organization of Homo Ergaster: Inferences from Anti-Predator Responses in Extant Primates.” *Journal of Human Evolution* 109. 11–21.
<https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2017.05.003>
- Wing, L. (2008). Whither neutrality? Mediation in the twenty-first century. In M. A. Trujillo, S. Y. Bowland, L. J. Myers, P. M. Richards, & B. Roy (Eds.), *Re-centering culture and knowledge in conflict resolution practice* (pp. 93–107). Syracuse, NY: Syracuse University Press.